

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Desa Tunggulsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati yang menarik perhatian banyak wisatawan karena potensi alamnya yaitu Desa Wisata “Mina Mangrove”. Desa Wisata “Mina Mangrove” merupakan suatu wisata alam berupa sebuah lokasi pantai di Desa Tunggulsari dengan pesona hutan mangrove yang indah. Selain itu, Desa Wisata “Mina Mangrove” juga memiliki daerah tujuan wisata lainnya yang tidak kalah menarik seperti budidaya ikan nila salin dan bandeng, atraksi wisata, kuliner, dan cinderamata. Dengan segala potensinya Desa Wisata “Mina Mangrove” Tunggulsari beberapa kali telah meraih penghargaan sebagai desa wisata terinovasi serta masuk sebagai nominasi terbaik video inovasi tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, negara Indonesia memang pantas disebut sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman wisata dan budaya yang indah di tiap-tiap daerahnya. Akan tetapi, potensi serta sumber daya alam tersebut belum dikembangkan dengan maksimal. Menurut Ni Wayan Giri Andyani selaku Deputi Bidang Pengembangan Bidang Industri dan Kelembagaan

Kementerian Pariwisata, sebagai industri di bidang jasa sektor pariwisata diyakini dapat memberikan kontribusi dalam membangun perekonomian nasional, mengembangkan wilayah, serta dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sektor pariwisata perlu diberikan perhatian lebih karena berpotensi untuk meningkatkan perekonomian serta melestarikan budaya dan lingkungan negara Indonesia (Ayuningsih et al., 2019).

Perkembangan pariwisata di Indonesia telah merambah dalam berbagai macam bentuk pendekatan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan bertujuan untuk menjamin wisata dilakukan di daerah tujuan wisata bukan daerah perkotaan. Desa wisata merupakan salah satu pendekatan pengembangan wisata yang bertujuan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat supaya bisa membangun pariwisata yang berkelanjutan di daerah pedesaan. Desa yang dapat dijadikan sebagai daerah wisata merupakan kawasan pedesaan yang mempunyai karakteristik-karakteristik untuk dapat dijadikan tujuan wisata. Biasanya di kawasan desa wisata penduduk setempat menjaga tradisi budayanya, lingkungannya pun masih asli dan sangat terjaga (Zakaria & Suprihardjo, 2014).

Desa sendiri merupakan suatu organisasi pemerintahan paling kecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik dilihat dari segi wilayahnya maupun dari segi tugasnya desa memiliki cakupan yang paling kecil dibandingkan dengan Pemerintahan Kabupaten,

Provinsi, dan Pemerintahan Pusat. Meskipun begitu, desa menjadi organisasi pemerintahan yang paling depan dan dekat dengan masyarakat karena dalam hal pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta memberdayakan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat (Mulyono, 2014).

Sebagai penyelenggara dalam pelayanan publik di daerah pedesaan, pemerintah desa bertugas untuk menciptakan kehidupan masyarakat desa yang demokratis serta memberi layanan sosial yang baik sehingga kehidupan masyarakatnya sejahtera, tenteram, dan adil. Pemerintah desa juga bertugas dalam pengembangan dan pembangunan desanya dengan memanfaatkan potensi di desanya. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan wilayah di desa yang berpotensi untuk menjadi daerah tujuan wisata sehingga dapat menarik perhatian wisatawan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat desanya.

Pembangunan pariwisata di kawasan pedesaan diharapkan dapat menjadi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sehingga sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan untuk dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan tidak mengurangi kemampuan dari generasi

selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya. Supaya pembangunan pariwisata dapat dipertahankan di masa depan maka diperlukan komitmen dari berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan alam, sosial ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Kebudayaan sangatlah penting untuk dijaga karena menjadi sumber daya yang paling utama untuk membangun pariwisata. Dalam pengembangan desa wisata diperlukan komitmen yang baik dari berbagai pihak yang bertanggung jawab serta kemampuan dari sumber daya manusia yang mendukung dalam pengembangan pariwisata di kawasan pedesaan sehingga kelestarian dan lingkungan desa terjaga (Atmoko, 2014).

Pada hakikatnya pengembangan pariwisata merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah tentu dapat mendatangkan berbagai macam manfaat bagi masyarakat baik itu secara ekonomis, sosial, dan budaya. Akan tetapi apabila pengembangan tersebut tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan masyarakat (Lahamadi et al., 2016). Tahapan implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan penting untuk dapat mengukur sejauhmana keberhasilan dari suatu program yang telah ditetapkan bersama. Pada tahapan ini dibutuhkan konsistensi dan juga kerjasama dari seluruh *stakeholder* yang berperan dalam mensukseskan desa wisata dengan membangun komunikasi dan kerjasama yang baik, sehingga setiap unsur atau elemen yang terlibat dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya supaya tujuan dari program desa wisata tercapai (Padabain & Nugroho, 2018).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tunggulsari supaya dapat mengembangkan Desa Wisata “Mina Mangrove”. Desa Tunggulsari sendiri bisa dikatakan sebagai Desa yang bisa berkembang untuk menjadi desa yang maju karena desa tersebut sadar jika memiliki potensi alam yang bisa dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat dan mau mengolahnya dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian dengan judul “Dinamika Implementasi Kebijakan Desa Wisata “Mina Mangrove” Desa Tunggulsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Perspektif Politik dan Administrasi”. Ketertarikan peneliti dalam penelitian ini yaitu bahwasannya Desa Tunggulsari bisa melihat bahwa desanya memiliki potensi di bidang wisata dan mampu untuk mengembangkannya. Pada mulanya potensi wisata di Desa Tunggulsari ini tidak mendapatkan apresiasi yang cukup dari masyarakat, setelah dikembangkannya pantai mina menjadi desa wisata dengan daya tarik hutan mangrove, budidaya ikan nila salin dan bandeng, atraksi wisata, kuliner, serta cinderamata kini desa wisata “Mina Mangrove” mulai ramai pengunjung dari masyarakat sekitar. Namun, fasilitas-fasilitas yang ada di desa wisata “Mina Mangrove” masih sangat minim dan masih dalam tahap pengembangan.

Sebagai pemilik ijin dari penetapan dan pengelolaan lokasi, Pemerintah Desa Tunggulsari memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga, mengelola, meningkatkan fungsi, serta melestarikan lingkungan kawasan Desa Wisata “Mina Mangrove”. Pemerintah Desa Tunggulsari bersama dengan BUMDes Jaya Sari, POKDARWIS (Kelompok Sadar Pariwisata) Muria Jaya Tunggulsari, dan seluruh masyarakat berharap supaya Desa Wisata “Mina Mangrove” dapat menopang perekonomian sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui sektor wisata yang mengangkat kearifan lokal dengan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan. Sekarang ini Desa Wisata “Mina Mangrove” telah ditetapkan menjadi desa wisata kabupaten melalui SK Bupati Pati No. 556 / 3428 Tahun 2019 berdasarkan pada Perda Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2018. Untuk mengatur pengelolaan dan pengembangan dari desa wisata “Mina Mangrove” pemerintah desa Tunggulsari menetapkan Peraturan Desa Tunggulsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” Tunggulsari. Oleh karena itu bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” supaya dapat mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Desa Wisata “Mina Mangrove” Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati ?
2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Desa Wisata “Mina Mangrove” Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan dalam pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” Tunggulsari.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” Tunggulsari telah dilaksanakan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian yang diselenggarakan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan dan pengembangan potensi desa wisata.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan yang membangun kepada Pemerintah Desa Tunggulsari serta pengurus desa wisata terkait implementasi kebijakan dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada peneliti berikutnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengkajian studi terdahulu menggunakan topik yang relevan dengan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pemahaman terhadap penyusunan proposal penelitian. Oleh karena itu, peneliti telah mengumpulkan dan mengkaji 10 jurnal yang relevan dengan tema proposal penelitian ini.

Tabel 1. Lireatur Review

No.	Nama	Judul Jurnal dan Nama Jurnal	Hasil
1.	Kurnia Dewi Swapradinta, Djoko Andreas Navalino, Jupriyanto (2019).	Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), <i>Jurnal Ekonomi Pertahanan</i> , Vol. 05, No. 2.	Kelembagaan ekonomi yang dibahas didalam penelitian ini yakni peran aktif Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) untuk memberdayakan masyarakat dan mengelola wisata. POKDARWIS mampu mendukung individu untuk menunjukkan kompetensi secara maksimal. Pengurus POKDARWIS dan masyarakat Desa Tembi sangat menjunjung solidaritas sehingga kegiatan pengelolaan wisata memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tembi (Swapradinta et al., 2019).
2.	Clara Shinta Praskasari, Budi Guntoro, Roso Witjaksono (2020).	Kapasitas Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman, <i>Jurnal Pariwisata Terapan</i> , Vol. 4, No. 1.	Pembentukan kelompok pengelola desa wisata bisa memudahkan koordinasi serta lebih fokus dalam pengembangan desa wisata. Dalam kepengurusan desa wisata penting untuk

			dijabarkan dalam sebuah struktur organisasi secara sistematis sehingga setiap pihak mengetahui tugas dan wewenangnya. Dari segi manajemen, kapasitas kelembagaan pengelola Desa Wisata Brajan dapat dilihat dari beberapa aspek yakni kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jejaring dan hubungan dengan <i>stakeholder</i> (Paskasari et al., 2020).
3.	I Nyoman Sukma Arida, LP. Kerti Pujani (2017).	Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa Wisata, <i>Jurnal Analisis Pariwisata</i> , Vol. 17, No. 1	Kriteria dasar dalam pengembangan desa wisata yaitu keberadaan obyek dan daya tarik, adanya akses fisik dan akses pasar, adanya potensi kemitraan, terdapat motivasi dan antusias masyarakat, dan terdapat fasilitas umum minimal. Prinsip perencanaan dalam pengembangan desa wisata adalah memperhatikan karakteristik lingkungan setempat, menekan sekecil mungkin dampak negatif dari pengembangan pariwisata di desa, menggunakan materi yang sesuai dengan lingkungan setempat, bahan-bahan operasional ramah lingkungan, serta memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Desa wisata melibatkan masyarakat desa dengan menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku kegiatan kepariwisataan dengan menjadi pemilik langsung / tidak langsung dari desa wisata tersebut dan kepemilikan atas tanah tidak dialihkan (Arida & Pujani, 2017).
4.	Muhammad Attar,	Analisis Potensi dan Arahan Strategi	Desa Ekowisata berbasis <i>Community Based</i>

	Luchman Hakim, Bagyo Yanuwiadi (2013).	Kebijakan Pengembangan Desa Ekowisata di Kecamatan Bumiaji-Kota Baru, <i>Journal of Indonesian Tourism and Development Studies</i> , Vol. 1, No. 2.	<i>Ecotourism</i> (CBE) dapat menekan dampak kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan peran serta kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Strategi pengembangan desa ekowisata di Desa Tulungrejo adalah, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pengembangan desa ekowisata, pengembangan pengelolaan potensi wisata dan ODTW di seluruh Kota Batu termasuk desa ekowisata, sosialisasi dan promosi program desa ekowisata, penyusunan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan desa ekowisata (Attar et al., 2013).
5.	Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, M. Baiquni (2013).	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali, <i>Kawistara</i> , Vol. 3, No. 2.	Dalam pengembangan desa wisata dibutuhkan partisipasi masyarakat lokal di semua tahapan pengembangan mulai dari perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Hal tersebut karena, sumber daya dan keunikan tradisi serta budaya yang melekat pada komunitas merupakan unsur utama dari penggerak kegiatan desa. Mengacu terhadap pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan, peran pemerintah dalam mengelola sumber daya pariwisata yaitu sebagai fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang besar untuk masyarakat (Dewi et al., 2013).
6.	Faris Zakaria, Rima Dewi Suprihardjo (2014).	Konsep Pembangunan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan	Faktor yang mendukung pengembangan desa wisata di Desa Bandungan adalah, media promosi,

		Pakong Kabupaten Pameksan, <i>Jurnal Teknik Pomits</i> , Vol. 3, No. 2.	peran aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata, dan kebijakan yang mengontrol pengembangan desa wisata di Desa Bandungan. Penelitian ini menghasilkan dua konsep pengembangan yaitu secara spasial dan non spasial. Konsep spasial yaitu dengan menyediakan rute perjalanan wisata, sarana transportasi khusus, dan fasilitas pendukung kegiatan wisata. Konsep non spasial yaitu dengan menjadikan adat istiadat sebagai peraturan kegiatan wisata, mengembangkan kawasan desa wisata berbasis agrowisata, menyediakan fasilitas penginapan, toko souvenir, rumah makan, tempat rekreasi memberikan pelatihan untuk masyarakat, membuat web mengenai desa wisata, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan dan menerapkan peraturan zonasi (Zakaria & Suprihardjo, 2014).
7.	Anton, Andi Irwan, Pariyati (2018).	Implementasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, <i>Kolaboratif Sains</i> , Vo. 1, No. 1.	Penelitian ini menggunakan pendekatan teori model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan berhasil apabila memenuhi aspek-aspek berikut, Aspek Sumber-Sumber Kebijakan, Aspek Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi, Aspek Kecenderungan, Aspek Karakteristik Agen Pelaksana, Aspek Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik. Dalam implementasi kebijakan

			Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi belum sesuai dengan harapan tujuan dan manfaat kebijakan PPEP karena terdapat aspek yang belum terpenuhi. Aspek tersebut yaitu Aspek Sumber-Sumber Kebijakan dan Aspek Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi (Anton et al., 2018).
8.	Jufri Frani Rompas, Agustinus B. Pati, Johny P. Lengkkong (2017).	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, <i>Jurnal Eksekutif</i> , Vol. 1, No. 1.	Menurut Grindle terdapat 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu proses hasil akhir (<i>outcomes</i>) dan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle yaitu isi kebijakan, kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Dalam penelitian ini implementasi kebijakan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena lemahnya kontrol oleh masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat (Rompas et al., 2017).
9.	Feki Lahamadi, Martha Ogotan, Very Y. Londa (2016).	Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara), <i>Jurnal Administrasi Publik</i> , Vol. 3.	Berdasarkan teori Edwards III, terdapat empat variabel dalam implementasi sebuah kebijakan. Variabel tersebut adalah, komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi. Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

			Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pantai Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara belum berjalan dengan baik. Hal tersebut karena birokrasi pemerintahan yang sering kali disepelekan dalam pengembangan objek wisata di Pantai Kumo sehingga tidak berkembang (Lahamadi et al., 2016).
10.	Ferry Aryanto Padabain, Saptono Nugroho (2018)	Implementasi Program Desa Wisata Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mas, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, <i>Jurnal Destinasi Pariwisata</i> , Vol.2	Dalam mengidentifikasi implementasi program kerja desa wisata yang dikelola oleh Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) digunakan 4 faktor utama syarat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi / pelaksana, dan tata aliran kerja (Padabain & Nugroho, 2018).

Berdasarkan penjelasan dari 10 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rompas et al., 2017). Pada penelitian tersebut untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan digunakan model implementasi kebijakan oleh Marilee S. Grindle. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama memakai model implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan.

Kemudian apabila dibandingkan dengan 9 penelitian terdahulu lainnya, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus penelitian dan indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan. Jika penelitian sebelumnya oleh (Lahamadi et al., 2016) dan (Padabain & Nugroho, 2018) menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III untuk mengukur implementasi kebijakan. Selain itu juga pada penelitian oleh (Anton et al., 2018) menggunakan model implementasi kebijakan oleh Van Meter Van Horn. Pada penelitian ini digunakan model implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle.

Apabila penelitian lainnya membahas mengenai strategi pengembangan desa wisata. Pada penelitian ini akan berfokus kepada implementasi kebijakan Desa Wisata “Mina Mangrove” supaya dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang telah disepakati. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena belum ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi kebijakan di Desa Wisata “Mina Mangrove” Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Publik

1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama dan bersifat mengikat. Pada umumnya, kebijakan (*policy*) digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan penting untuk dapat mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan di organisasi pemerintahan ataupun privat. Suatu kebijakan sebaiknya tidak mengandung keberpihakan di suatu kepentingan tertentu dan berlaku konsisten bagi semua pihak. Kebijakan publik (*public policy*) adalah rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh suatu badan / lembaga serta pejabat pemerintahan (Anggara, 2014).

Menurut Thomas R. Dye dalam (Dwijowijoto, 2003) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa hal tersebut dilakukan, dan hasil yang didapatkan setelah

kebijakan tersebut diterapkan. Sementara itu, Thomas Dye dalam (Anggara, 2014) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan apapun pilihan dari pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Sedangkan Carl I. Friedrich dalam (Dwijowijoto, 2003) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan suatu potensi yang ada serta mengatasi hambatan yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang sedang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Bridgeman dan Davis dalam (Anggara, 2014) menyebutkan bahwa dalam suatu kebijakan publik setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang saling berhubungan antara satu sama lain yaitu sebagai tujuan, sebagai pilihan dari tindakan yang legal serta valid dimata hukum, dan sebagai asumsi awal. Tujuan dari suatu kebijakan yaitu untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan oleh publik. Kebijakan publik merupakan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan tersebut dirumuskan oleh lembaga yang berwenang dalam pemerintahan. Kebijakan publik sebagai hipotesis yaitu kebijakan yang disusun berdasarkan pada teori, model, maupun hipotesis mengenai

sebab akibat. Kebijakan selalu berpedoman terhadap asumsi-asumsi mengenai perilaku.

Suatu kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat mendorong seluruh masyarakatnya untuk membangun daya saingnya masing-masing sehingga masyarakatnya tidak mengalami ketergantungan. Kebijakan publik adalah salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan bersama yang telah dicita-citakan. Cita-cita yang ingin dicapai oleh nega Indonesia yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, kebijakan publik adalah prasaran dan sarana untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati tersebut (Dwijowijoto, 2003).

1.2 Teori dan Proses Kebijakan Publik

Teori dan proses dari kebijakan publik menitikberatkan kepada seluruh persoalan yang telah diajukan oleh pemerintah serta memuat arah dan aksi yang akan ditindak lanjuti. Sifat dari kebijakan publik sebagai arah tindakan diperimci menjadi beberapa aspek yaitu, desakan kebijakan, putusan kebijakan, pernyataan kebijakan, dampak kebijakan, dan hasil kebijakan. Merujuk terhadap berbagai tahapan yang telah ditawarkan oleh sejumlah ahli domain dari kebijakan publik

terdiri dari, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan.

Kebijakan publik dibedakan dalam analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Pada garis besarnya kebijakan publik memuat beberapa tahapan yaitu, perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Di dalam analisis kebijakan akan dilakukan analisis terhadap pembentukan, substansi, dan dampak dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebaiknya suatu kebijakan oleh pemerintah melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik. Terdapat tiga aspek penting yang harus untuk dicermati dalam analisis kebijakan publik yaitu, fokus utama kebijakan, sebab dan akibat dari kebijakan, dan analisis yang dapat menghembangkan kebijakan. Analisis dalam kebijakan publik sangat berguna untuk merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan publik.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah salah satu cara supaya dapat mencapai tujuan dari kebijakan. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satu perspektif atau pendekatan tersebut yaitu Menurut Merilee S. Grindle dalam (Tachjan, 2006) keberhasilan dari implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut, yaitu *Content* dan *Context*:

Content of Policy (Isi Kebijakan) menurut Merilee S. Grindle dalam (Liana & Santoso, 2019), mencakup:

1. *Interest affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti akan melibatkan banyak kepentingan, maka kepentingan-kepentingan tersebut harus bisa satu frekuensi dan dapat membawa pengaruh pada implementasinya.

2. *Type of benefits* (Tipe manfaat)

Dalam suatu kebijakan harus memiliki beberapa jenis manfaat yang memberikan dampak positif dari hasil implementasi kebijakan yang akan dilakukan.

3. *Extent of change envisioned* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Dalam suatu implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas seberapa besar perubahan yang ingin dicapai ketika melakukan kebijakan.

4. *Site of decision making* (Letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5. *Program implementor* (Pelaksana program)

Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung juga dengan pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel supaya dapat mencapai tujuan dari suatu kebijakan.

6. *Resources committed* (Sumberdaya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung dengan sumberdaya-sumberdaya yang mendukung. Supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Context of Implementation (Lingkungan Kebijakan) menurut Merilee S. Grindle dalam (Liana & Santoso, 2019), mencakup:

1. *Power, interest, and strategies of actors involves* (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan diperlukan perhitungan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat supaya dapat memperlancar jalannya implementasi kebijakan.

2. *Institution and regime characteristics* (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dari pelaksanaan kebijakan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dibutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga jika pengimplementasian suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil.

3. *Compliance and responsiveness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Sejauh mana kepatuhan dan respon dari para pelaksana kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan.

Implementation problems approach merupakan salah satu model kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III. Menurut Edwards III dalam implementasi kebijakan dimulai dengan mengemukakan pertanyaan mengenai faktor yang mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan dan faktor yang menghambat keberhasilan dari implementasi kebijakan. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang menjadi syarat keberhasilan proses implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi (Goldschlag et al., 2019).

1. Komunikasi

Komunikasi dapat dilakukan dengan baik apabila jelas untuk para pelaksana kebijakan. Hal tersebut terkait dengan kejelasan dalam menyampaikan informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi.

2. Sumber daya

Sumber daya mencakup 4 (empat) aspek yaitu kecukupan staff (jumlah dan mutu), terdapat informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan, otoritas untuk menjalankan tugas ataupun tanggung jawab, dan terdapat sarana yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi / sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berdasarkan *standard operating procedure* yang berisi mengenai tata aliran pekerjaan dan pelaksana kebijakan.

Supaya kebijakan bisa terlaksana dengan lancar maka perlu dilakukan sosialisasi dengan baik. Terdapat empat syarat pengelolaan sosialisasi kebijakan yaitu:

1. Adanya keseganan dari anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah yang memberikan penjelasan untuk harus patuh terhadap peraturan perundang-undang yang telah dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang.

2. Terdapat kesadaran untuk bisa menerima kebijakan. Kesadaran tersebut merupakan dorongan untuk dapat menerima dan melakukan kebijakan tersebut apabila kebijakan bertujuan untuk kebaikan bersama.
3. Terdapat kepercayaan bahwa kebijakan tersebut dibuat dan disahkan secara resmi.
4. Pada mulanya sebuah kebijakan diduga dapat menimbulkan kontroversi, akan tetapi seiring dengan bertambahnya waktu kebijakan tersebut akan dianggap wajar dan dapat diterima (Goldschlag et al., 2019).

A Model of the Policy Implementatiom merupakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn dalam (Tachjan, 2006). Model ini menjelaskan bahwa kinerja dari kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel- variabel tersebut yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Menurut Kurniawan & Maani dalam (Fauziyah & Arif, 2021) untuk mengukur kinerjadari implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber Daya

Menurut Kurniawan & Maani dalam (Fauziah & Arif, 2021) keberhasilan dari implementasi kebijakan bergantung kepada kemampuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentu dibutuhkan dukungan baik itu dari sumber daya manusia (*human resources*) maupun dukungan sumber daya non-manusia (*non-human resources*).

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Menurut Purnamasari & Pradana dalam (Fauziah & Arif, 2021) dalam sebuah implementasi kebijakan diperlukan identifikasi dan mengetahui karakteristik agen pelaksananya supaya dapat mencapai keberhasilan yang maksimal.

4. Komunikasi organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Koordinasi komunikasi merupakan salah satu mekanisme yang paling penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka dapat memperkecil kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi.

5. Sikap pelaksana

Sikap implementor kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam efektivitas implementasi kebijakan. Widodo dalam (Fauziah & Arif, 2021) menyatakan bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan, dalam hal ini disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Menurut Agustino dalam (Fauziah & Arif, 2021) sukses atau tidaknya suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, apabila lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan suatu kebijakan dapat berhasil.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Dwijowijoto, 2003) proses implementasi kebijakan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) variabel yaitu, variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen. Pertama, variabel independen merupakan mudah atau sulitnya suatu masalah untuk dikendalikan. Hal tersebut mengenai indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, serta perubahan yang diinginkan. Kedua, variabel

intervening merupakan kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, menggunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Variabel tersebut antara lain, indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risoritas dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variabel dependen merupakan suatu tahapan dalam proses implementasi kebijakan. Terdapat 5 (lima) tahapan yaitu, pemahaman dari badan / lembaga pelaksana yang berbentuk penyusunan kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan hasil nyata tersebut, dan pada akhirnya revisi dari kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut maupun seluruh kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Desa Wisata

3.1 Pengertian Desa Wisata

Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat Muliawan dalam (Atmoko, 2014). Menurut Fred Lawson dalam (Susanti, 2015) desa wisata merupakan pusat akomodasi yang biasanya direncanakan menjadi resort tunggal dengan berbagai fasilitas pendukung seperti olahraga dan rekreasi di dalam lingkungan alami maupun buatan. Sedangkan menurut Wiendu Nurhayati dalam (Susanti, 2015) desa wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara serta tradisi yang berlaku.

Terdapat beberapa kriteria yang diperlukan dalam desa wisata. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- a. Atraksi wisata, atraksi merupakan aspek pilihan yang menarik dan atraktif di desa. Atraksi wisata mencakup alam, budaya, serta hasil ciptaan manusia.
- b. Jarak tempuh, jarak yang ditempuh wisatawan untuk menuju kawasan wisata serta jarak tempuh dari ibukota provinsi dan kabupaten.
- c. Besaran desa, hal ini mencakup jumlah penduduk, jumlah rumah, karakteristik serta luas wilayah desa. Kriteria ini berhubungan pada daya dukung kepariwisataan dalam suatu desa.
- d. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek paling penting karena pasti terdapat aturan-aturan khusus dalam suatu desa dan agama menjadi mayoritas serta sistem kemasyarakatan yang ada.
- e. Adanya infrastruktur, hal ini meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, dll.
(Susanti, 2015).

Menurut Karyono dalam (Atmoko, 2014) komponen-komponen dalam pengembangan desa wisata adalah:

- a. Akomodasi, akomodasi pada desa wisata yaitu sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.

- b. Unsur institusi atau kelembagaan dan SDM, dalam pengembangan desa wisata lembaga yang mengelola harus memiliki kemampuan yang handal.
- c. Fasilitas pendukung wisata lainnya, pengembangan desa wisata harus memiliki fasilitas-fasilitas pendukung.
- d. Infrastruktur lainnya, infrastruktur lainnya juga sangat penting disiapkan dalam pengembangan desa wisata.
- e. Transportasi, transportasi sangat penting untuk memperlancar akses tamu.
- f. Sumber daya lingkungan alam dan sosial budaya.
- g. Masyarakat, dukungan masyarakat sangat besar perannya seperti menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, dan keramah tamahan.

3.2 Tipe-Tipe Desa Wisata

Menurut Soenarmo dalam (Susanti, 2015) berdasarkan proses serta tipe dari pengelolaannya desa wisata di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu tipe terstruktur (*enclave*) dan tipe terbuka (*sontaneus*).

1. Tipe Terstruktur

Tipe terstruktur (*enclave*) dapat ditandai berdasarkan karakter-karakter di bawah ini:

- a. Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik di kawasan desa wisata. Tipe ini memiliki kelebihan di citra yang bisa ditimbulkan sehingga berpotensi dapat menembus pasar internasional.
- b. Lokasi yang terpisah dari masyarakat maupun penduduk lokal, sehingga dapat mengontrol dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, dapat mendeteksi lebih awal munculnya pencemaran sosial budaya.
- c. Lahan yang tidak terlalu besar dan masih dalam tingkatan perencanaan dan terkoordinasi, sehingga bisa menjadi suatu agen dalam mendapatkan dana-dana internasional yang menjadi unsur utama untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dari hotel-hotel.

2. Tipe terbuka

Tipe terbuka (*spontaneous*) dapat ditandai dengan beberapa karakter-karakter dibawah ini:

- a. Tumbuh dan menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan baik ruang ataupun pola dengan masyarakat lokal.
- b. Distribusi pendapatan dari wisatawan bisa langsung dinikmati oleh penduduk lokal.

Akan tetapi, tipe terbuka (*spontaneous*) memiliki kekurangan yaitu, dampak negatif yang ditimbulkan dapat menjalar dengan cepat ke dalam penduduk lokal sehingga akan sulit untuk dikendalikan.

3.3 Peraturan Desa Tunggulsari Nomor 2 Tahun 2021

Dalam rangka pengembangan desa wisata dibutuhkan patokan untuk dapat melakukan penataan, pengelolaan, dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya yang dilakukan secara selaras dan berkelanjutan. Maka, dengan adanya persetujuan bersama dari Badan Permusyawaratan Desa Tunggulsari dengan Kepala Desa, ditetapkanlah Peraturan Desa yang mengatur mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata. Pengelolaan merupakan sebuah cara terpadu yang dilakukan untuk mengefesienkan potensi dan sumber daya wisata yang ada dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan serta bisa mencukupi semua keperluan masyarakat, menarik wisatawan dengan cara tetap menjaga dan meningkatkan kecukupan akan kebutuhan di masa depan. Sedangkan pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta memanfaatkannya dengan memperhatikan kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan supaya dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan desa wisata dilaksanakan dengan berpedoman pada beberapa asas meliputi kemanfaatan dan keberlanjutan, kreatif dan partisipatif, efisien dan efektif, serta berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan. Jangkauan dari pengembangan desa wisata yaitu mencakup penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Desa Tunggulsari. Maksud dari dilakukannya pengembangan desa wisata yaitu supaya potensi dan sumber daya di bidang pariwisata bisa ditata dan dikelola untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

G. Definisi Konsepsional

1. Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang dikerjakan oleh pemerintah dan bersifat mengikat untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Implementasi Kebijakan adalah salah satu cara supaya dapat mencapai tujuan dari kebijakan.
3. Desa Wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam proposal penelitian ini. Selain itu, definisi operasional dapat mempermudah untuk melakukan analisis data dengan adanya batasan-batasan yang diidentifikasi untuk menjawab masalah penelitian. Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam (Tachjan, 2006) yang menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of policy* (lingkungan kebijakan).

Model implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle digunakan karena Grindle memperkenalkan model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administratif. Model implementasi kebijakan tersebut menjabarkan proses dari pengambilan keputusan oleh semua aktor yang terlibat dan hasil akhirnya ditentukan dari materi program yang telah dicapai maupun dari interaksi pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Dari teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle tersebut akan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan Desa Wisata “Mina Mangrove” Tunggulsari. Beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yaitu:

1. *Content of Policy*

a. *Interest affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” harus didukung oleh kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan tersebut baik dari pihak internal maupun eksternal harus satu frekuensi untuk mensukseskan kebijakan tersebut.

b. *Type of benefits* (Tipe manfaat)

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” harus dapat memberikan dampak yang positif kepada Pemerintah Desa Tunggulsari maupun masyarakat Desa Tunggulsari.

c. *Extent of change envisioned* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” harus memberikan skala perubahan yang jelas supaya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuannya.

d. *Site of decision making* (Letak pengambilan keputusan)

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina

Mangrove” harus dapat mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan yang ada supaya dapat mencapai tujuan dari kebijakan.

e. *Program implementor* (Pelaksana program)

Pemerintah Desa Tunggulsari dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” harus kompeten dan kapabel supaya dapat mencapai tujuan dari kebijakan.

f. *Resources committed* (Sumber daya yang digunakan)

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” harus didukung dengan sumber daya finansial maupun sumber daya manusia supaya dalam pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.

2. *Context of Policy*

a. *Power, interest, and strategies of actors involves* (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)

Untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” kekuasaan, kepentingan, dan strategi kebijakan yang ada harus memiliki keterkaitan dengan sasaran kebijakan karena sangat berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

- b. *Institution and regime characteristics* (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” dibutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga supaya pengimplementasian kebijakan dapat berhasil.

- c. *Compliance and responsiveness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” pelaksana kebijakan harus menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi supaya tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan di Desa Wisata Mina Mangrove Desa Tunggulsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati” digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode pencarian fakta yang ada dengan memakai tafsiran yang sesuai sasaran. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan menggunakan cara lain dari pengukuran. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena metode penelitian ini memberikan gambaran seutuhnya secara sistematis, akurat, dan faktual.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata “Mina Mangrove” Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Titik dari pengambilan data yaitu di Desa Tunggulsari.

3. Unit Analisis

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan sumber data yang diperoleh dari beberapa narasumber. Adapun unit analisis pada penelitian ini meliputi Kepala Desa Tunggulsari, Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Muria Jaya Desa Tunggulsari, Sekertaris BUMDes Jaya Sari, Kepala Unit Wisata Alam BUMDes Jaya Sari, dan 5 masyarakat Desa Tunggulsari.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa Tunggulsari
2. Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Muria Jaya
Desa Tunggulsari
3. Sekertaris BUMDes Jaya Sari
4. Kepala Unit Wisata Alam BUMDes Jaya Sari
5. Masyarakat Desa Tunggulsari.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang undangan, serta sumber lain yang mendukung. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 556 / 3428 Tahun 2019,
2. Peraturan Desa Tunggulsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” Tunggulsari
3. Profil Desa Tunggulsari.
4. Profil Desa Wisata “Mina Mangrove” Tunggulsari

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi yang ada baik berupa *record* maupun *document*.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu kondisi, situasi, proses, atau perilaku fenomena yang sedang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan.

6. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan objektif maka penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maka dari itu teknik analisa data yang dilakukan adalah:

1. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder setelah itu akan dilakukan reduksi data.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis data untuk mereduksi dan merangkum hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah reduksi data dilakukan penyajian data dengan cara menyusun data-data hasil dari penelitian dengan rinci untuk memberikan gambaran penelitian.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dengan memberikan makna dari data yang sudah dianalisis.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu urutan dalam menyusun suatu penelitian. Hal tersebut bertujuan supaya dapat menyusun penelitian dengan runtut dan rapi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Kerangka Teori
- G. Definisi Konseptual
- H. Definisi Operasional
- I. Metode Penelitian

BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

- A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Pati
 - 1. Letak Geografis
 - 2. Visi dan Misi Kabupaten Pati
 - 3. Potensi potensi Kabupaten Pati
- B. Deskripsi Wilayah Kecamatan Tayu
 - 1. Letak Geografis
 - 2. Visi dan Misi Kecamatan Tayu

3. Potensi potensi Kecamatan Tayu

C. Deskripsi Wilayah Desa Tunggulsari

1. Sejarah Desa
2. Letak Geografis
3. Visi dan Misi Desa Tunggulsari
4. Potensi potensi Desa Tunggulsari
5. Profil Kepala Desa Tunggulsari
6. Struktur Organisasi Desa Tunggulsari
7. Profil Desa Wisata “Mina Mangrove” Tunggulsari
8. Profil Pengelola Desa Wista “Mina Mangrove” Tunggulsari

BAB III DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA WISATA “MINA MANGROVE” DESA TUNGGULSARI, KECAMATAN TAYU, KABUPATEN PATI PERSPEKTIF POLITIK DAN ADMINISTRASI

1. Peraturan Desa Tunggulsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” Tunggulsari
2. Dinamika Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata “Mina Mangrove” Desa Tunggulsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Perspektif Politik dan Adminitrasi
 - A. Content of Policy (Isi Kebijakan)
 - B. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran